

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(Studi Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bintan)**

Oleh
Putra Ramadhan
NIM. 2205040109

ABSTRAK

Kerentanan geografis Kabupaten Bintan sebagai wilayah kepulauan menempatkan daerah ini pada risiko tinggi terhadap kejahatan peredaran gelap narkoba yang ditandai dengan fluktuasi angka kasus di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan berdasarkan peraturan daerah serta menegaskan sumber dan sifat kewenangannya, sekaligus menganalisis pelaksanaan kewenangan instansi tersebut berdasarkan dokumen perencanaan dan realitas empiris. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk membedah norma hukum serta pendekatan sosiologis hukum untuk menguji kepatuhan administratif di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan bersumber dari peraturan perundang-undangan dengan sumber perolehan kewenangan berupa delegasi dari Bupati Bintan, serta memiliki sifat kewenangan terikat yang menutup penggunaan diskresi. Pada tingkat pelaksanaan, fungsi fasilitasi belum berjalan secara efektif akibat keterbatasan jumlah personel operasional, rasionalisasi anggaran daerah, serta belum sesuai pelaporan antarinstansi. Selain itu dokumen rencana aksi daerah mengalami disorientasi karena ketiadaan pelaporan, sehingga fungsi koordinasi dalam forum rapat dilakukan namun tidak menghasilkan pembahasan yang efektif. Berdasarkan kondisi tersebut pelaksanaan kewenangan instansi disimpulkan belum bertransformasi menjadi tindakan pemerintahan yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penataan pembagian kerja pegawai, pengelolaan efisiensi anggaran daerah, penegakan disiplin pelaporan antarinstansi, serta penguatan peran aktif seluruh anggota tim terpadu dalam forum koordinasi.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Kewenangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(Studi Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bintan)**

Oleh
Putra Ramadhan
NIM. 2205040109

ABSTRACT

The geographical vulnerability of Bintan Regency as an archipelagic region places this area at high risk for illicit narcotics trafficking crimes marked by fluctuating case numbers in the field. This study aims to delineate the authority of the National and Political Unity Agency of Bintan Regency based on regional regulations and affirm the source and nature of its authority, while simultaneously analyzing the implementation of the agency's authority based on planning documents and empirical realities. The analytical framework of this research utilizes the theory of authority from Philipus M. Hadjon. The research method applied is normative and empirical legal research utilizing a statutory approach to dissect legal norms and a legal sociological approach to test administrative compliance in the field. The research findings indicate that the authority of the National and Political Unity Agency of Bintan Regency derives from statutory regulations with the acquisition source of authority being delegation from the Regent of Bintan, and possesses a bound nature of authority that precludes the use of discretion. At the implementation level, the facilitation function has not run effectively due to limited operational personnel, regional budget rationalization, and non-compliant inter-agency reporting. In addition, the regional action plan document experienced disorientation due to the absence of reporting, so that the coordination function in meeting forums was conducted but failed to produce effective discussion. Based on these conditions, it is concluded that the implementation of the agency's authority has not transformed into effective governmental action. This study recommends structuring employee work distribution, managing regional budget efficiency, enforcing inter-agency reporting discipline, and strengthening the active role of all integrated team members in coordination forums.

Keywords: Regional Regulation, Authority, National and Political Unity Agency.